PENGUATAN LITERASI HUKUM, DIGITAL, DAN KETAHANAN PSIKOSOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERBASIS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

Raharjo[1], Etin Solihatin[1], Yuyus Kardiman[1], Laras Veby Damayanti[1], Muhammad Faza Abdullah[1], Nadia Triana Nurhimah[1]
[1]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Email: raharjo@unj.ac.id, *esolihatin@unj.ac.id*, *yuyus-kardiman@unj.ac.id*

Abstract

Indonesian Migrant Workers (IMWs) abroad face multidimensional challenges, including legal protection, the ability to access and evaluate digital information, and the capacity to cope with social and psychological stress. This community engagement program aimed to strengthen the capacities of IMWs through the integration of legal literacy, digital literacy, and psychosocial resilience within a community empowerment framework. The program was conducted collaboratively with the Indonesian Community Association (Persatuan/Pertubuhan Masyarakat Indonesia, PERMAI) at the PERMAI Learning Center in Penang, Malaysia, from May 6 to 9, 2026. The program employed a participatory approach involving coordination and needs identification, educational sessions, interactive discussions, experience sharing and reflection, mentoring, community network strengthening, and reflective evaluation. The results indicate that the program facilitated dialogue between the implementation team and IMWs, strengthened participants' understanding of their legal rights and obligations, raised awareness of critical and safe digital technology use, and enhanced awareness of the importance of social support and psychosocial resilience. The program also strengthened the partnership between Universitas Negeri Jakarta and PERMAI Penang and generated outputs, including publications, activity documentation, educational media, and strengthened community networks. The findings suggest that integrating legal, digital, and psychosocial literacy is a relevant approach to empowering IMWs, as these three dimensions are interconnected in building individual and community capacities. Further evaluation is needed to assess the sustainability of changes in participants' capacities.

Keywords: *Indonesian migrant workers; legal literacy; digital literacy; psychosocial resilience; community empowerment.*

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menghadapi persoalan yang bersifat multidimensional, meliputi perlindungan hukum, kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi digital, serta kemampuan menghadapi tekanan sosial dan psikologis. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas PMI melalui integrasi literasi hukum, literasi digital, dan ketahanan psikososial berbasis pemberdayaan komunitas. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif bersama komunitas Persatuan/Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) di Learning Center PERMAI Pulau Pinang, Malaysia, pada 6–9 Mei 2026. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui koordinasi dan identifikasi kebutuhan, edukasi, diskusi interaktif, refleksi pengalaman, pendampingan, penguatan jejaring komunitas, dan evaluasi reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya ruang dialog antara tim pelaksana dan PMI, penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, peningkatan kesadaran mengenai penggunaan teknologi digital secara kritis dan aman, serta penguatan kesadaran mengenai pentingnya dukungan sosial dan ketahanan psikososial. Kegiatan juga memperkuat kemitraan antara Universitas Negeri Jakarta dan PERMAI Pulau Pinang serta menghasilkan luaran berupa publikasi, dokumentasi kegiatan, media edukasi, dan penguatan jejaring komunitas. Temuan kegiatan menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum, digital, dan psikososial relevan sebagai pendekatan pemberdayaan PMI karena ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun kapasitas individu dan komunitas. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan perubahan kapasitas peserta.

Kata kunci: *pekerja migran Indonesia; literasi hukum; literasi digital; ketahanan psikososial; pemberdayaan komunitas.*

PENDAHULUAN (*Introduction*)

Mobilitas pekerja lintas negara merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi pekerja migran Indonesia, sehingga perlindungan hak dan penguatan kapasitas PMI di negara tujuan menjadi perhatian yang berkelanjutan. Perlindungan pekerja migran tidak cukup dipahami sebagai urusan penempatan, tetapi mencakup pemenuhan hak, akses informasi, mekanisme pengaduan, dan dukungan selama bekerja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menempatkan pelindungan PMI dalam siklus sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (Republik Indonesia, 2017). Namun, ketersediaan aturan perlu disertai kapasitas pekerja untuk memahami dan memanfaatkan informasi perlindungan.

Kajian mengenai PMI di Malaysia telah membahas persoalan perlindungan hukum, kerentanan dalam hubungan kerja, dan kebutuhan advokasi, serta tantangan perlindungan hak PMI di Malaysia, Habib et al. (2024) mengkaji perlindungan hukum PMI dari perspektif standar ILO. Kajian lebih baru juga menunjukkan pentingnya pendekatan komunitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran (Koesrianti et al., 2026; Suhada et al., 2024). Pada ranah pengabdian, Puteri et al. (2025) membahas literasi perjanjian perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hukum PMI, sementara Arief et al. (2026) menekankan literasi kontrak kerja digital dan bukti digital sebagai pengetahuan praktis menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Selain literasi hukum, kemampuan menggunakan teknologi digital menjadi kebutuhan penting. Akses terhadap telepon pintar dan media sosial tidak dengan sendirinya menunjukkan kecakapan digital. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital (Law et al., 2018). Fithriyah et al. (2023) menunjukkan relevansi pelatihan literasi digital bagi PMI di Malaysia. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, kompetensi tersebut relevan untuk mendukung akses terhadap informasi pekerjaan, layanan publik, komunikasi keluarga, serta jejaring komunitas, dengan tetap memperhatikan verifikasi informasi dan keamanan data pribadi.

Dimensi psikososial juga perlu diperhatikan. Adaptasi terhadap lingkungan sosial-budaya baru, jarak dari keluarga, tuntutan kerja, serta keterbatasan jejaring dukungan dapat memengaruhi pengalaman keseharian pekerja migran. Sari dan Wicaksana (2024) menggabungkan kesiapan psikososial dan edukasi hak pekerja dalam program pemberdayaan PMI di Malaysia. Ahyar et al. (2025) juga mengulas kompleksitas kehidupan dan ketahanan sosial-psikologis PMI di Malaysia. Kajian-kajian tersebut memberi dasar bagi pendekatan yang tidak memisahkan kapasitas hukum dari dukungan sosial dan psikososial.

Meskipun kajian dan program terdahulu telah membahas literasi digital, perlindungan hukum, maupun dukungan psikososial, ketiganya kerap ditangani sebagai tema yang terpisah. Artikel ini menawarkan kontribusi praktik berupa dokumentasi program pengabdian yang mengintegrasikan ketiga ranah tersebut dalam kerangka pemberdayaan komunitas PMI bersama organisasi PERMAI Pulau Pinang. Kebaruan artikel terletak pada sintesis implementatif antara edukasi hak, kecakapan digital kritis, refleksi psikososial, dan penguatan kemitraan komunitas dalam satu rangkaian kegiatan. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program, menguraikan capaian yang terdokumentasi, serta membahas peluang dan keterbatasan pendekatan integratif tersebut.

TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Pemberdayaan komunitas merupakan proses penguatan kapasitas agar anggota masyarakat dapat mengenali kebutuhan, terlibat dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya, dan mengembangkan tindakan kolektif. Dalam pengabdian berbasis komunitas, partisipasi mitra idealnya hadir sejak identifikasi kebutuhan hingga refleksi dan tindak lanjut. Suhada et al. (2024) menempatkan komunitas migran sebagai unsur penting dalam pemberdayaan dan advokasi PMI, sementara Koesrianti et al. (2026) menekankan kolaborasi multiaktor dan jaringan komunitas dalam tata kelola perlindungan pekerja migran.

Literasi hukum dalam program ini dimaknai secara fungsional, yakni kemampuan mengenali hak dan kewajiban, memahami dokumen dan ketentuan relevan, mengidentifikasi sumber informasi tepercaya, serta mengetahui jalur konsultasi atau bantuan. Bagi PMI, pemahaman tersebut perlu dikaitkan dengan situasi konkret dan kerangka hukum negara asal maupun negara tujuan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyediakan kerangka pelindungan nasional, sedangkan literasi hukum membantu individu memahami relevansi aturan tersebut dalam siklus migrasi (Habib et al., 2024; Republik Indonesia, 2017)

Literasi digital mengacu pada kompetensi untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Kompetensi ini mencakup aspek literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media (Law et al., 2018). Oleh karena itu, penguatan literasi digital bagi pekerja migran Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada keterampilan operasional, tetapi juga pada kemampuan mengevaluasi kredibilitas informasi, menjaga keamanan data pribadi, dan memanfaatkan teknologi secara produktif.

Ketahanan psikososial dipahami sebagai kapasitas individu untuk beradaptasi dan menghadapi tekanan dengan dukungan sumber daya personal serta sosial. Program komunitas tidak menggantikan layanan profesional ketika dibutuhkan, tetapi dapat memperkuat kesadaran, komunikasi, dukungan sebaya, dan akses terhadap jejaring bantuan. Literatur tentang PMI di Malaysia menggarisbawahi pentingnya memperhatikan dimensi sosial-psikologis dalam pengalaman migrasi (Ahyar et al., 2025; Sari & Wicaksana, 2024)

Ketiga ranah tersebut saling melengkapi. Pengetahuan hukum membantu PMI mengenali hak; literasi digital mendukung pencarian dan penilaian informasi; sementara dukungan psikososial dan komunitas dapat membantu individu mengolah pengalaman dan menentukan langkah. Oleh sebab itu, program ini menggunakan integrasi ketiga komponen sebagai kerangka praktik, bukan sebagai klaim model yang telah tervalidasi secara eksperimental.

METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Lokasi, mitra, dan sasaran

Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional dilaksanakan oleh tim Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, bekerja sama dengan PERMAI Pulau Pinang, Malaysia. Kegiatan berlangsung pada 6–9 Mei 2026 di Learning Center PERMAI Pulau Pinang, dengan kegiatan inti pada 7 Mei 2026. Sasaran program adalah PMI dan anggota komunitas masyarakat Indonesia di Pulau Pinang. Jumlah peserta tidak dicantumkan karena angka terverifikasi tidak tersedia pada dokumentasi yang digunakan untuk penyusunan artikel.

Desain dan tahapan kegiatan

Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan komunitas. Mitra dilibatkan dalam koordinasi, penyesuaian materi, pelaksanaan, diskusi, refleksi, dan penjajakan tindak lanjut. Rangkaian kegiatan meliputi: (1) koordinasi dan persiapan bersama mitra; (2) penyusunan materi berdasarkan tiga tema prioritas; (3) edukasi dan diskusi interaktif; (4) berbagi pengalaman dan refleksi; (5) penguatan jejaring serta kemitraan; dan (6) dokumentasi dan evaluasi reflektif.

Materi dan strategi fasilitasi

Materi literasi hukum mencakup hak dan kewajiban PMI, pentingnya memahami aturan dan dokumen kerja, mekanisme perlindungan, serta pencarian sumber bantuan yang sesuai. Materi literasi digital mencakup penggunaan teknologi secara kritis, aman, produktif, dan bertanggung jawab, termasuk pemilihan dan evaluasi informasi. Materi ketahanan psikososial mencakup kesadaran menjaga kesejahteraan psikologis, adaptasi, relasi sosial positif, berbagi pengalaman, dan dukungan sebaya. Fasilitasi dilakukan melalui pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, dan refleksi pengalaman.

Pengumpulan informasi dan analisis

Artikel disusun sebagai deskripsi evaluatif atas pelaksanaan program dengan menggunakan informasi dalam laporan kemajuan, dokumentasi visual, dan catatan capaian kegiatan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi ke dalam proses, output, outcome awal yang terindikasi, serta tindak lanjut. Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti visual kegiatan dan kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Persiapan dan pelaksanaan program

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi tim pelaksana dengan PERMAI Pulau Pinang untuk menyelaraskan tujuan, materi, lokasi, peserta, dan kebutuhan teknis. Kegiatan 6 Mei 2026 difokuskan pada koordinasi dan kesiapan pelaksanaan, sedangkan kegiatan inti pada 7 Mei 2026 dilaksanakan melalui edukasi, pendampingan, diskusi, refleksi pengalaman, dan penguatan partisipasi komunitas. Susunan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada penciptaan ruang dialog antara tim akademik dan komunitas sasaran.

Kegiatan dilaksanakan pada Learning Center PERMAI, sebuah ruang komunitas yang memungkinkan interaksi langsung antara fasilitator dan peserta. Pemilihan lokasi mitra memberi konteks yang dekat dengan keseharian komunitas dan mendukung komunikasi yang lebih partisipatif. Pendekatan berbasis kebutuhan dan keterlibatan mitra ini sejalan dengan kajian pemberdayaan komunitas migran yang menekankan peran jaringan sosial dan kolaborasi (Koesrianti et al., 2026; Suhada et al., 2024).

Penguatan literasi hukum

Sesi literasi hukum diarahkan pada pemahaman hak dan kewajiban PMI, pentingnya memahami ketentuan yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan di negara tujuan, serta pengetahuan mengenai akses informasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan. Pembahasan hukum ditempatkan dalam konteks praktis agar peserta dapat menghubungkan informasi normatif dengan kebutuhan keseharian. Kerangka ini relevan dengan UU No. 18 Tahun 2017 yang mengatur pelindungan PMI dalam tahapan sebelum, selama, dan setelah bekerja (Republik Indonesia, 2017).

Kajian terdahulu tentang perlindungan PMI menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat diarahkan pada kebutuhan yang spesifik, seperti pemahaman perlindungan hukum, perjanjian, kontrak, dan bukti digital (Arief et al., 2026; Habib et al., 2024; Puteri et al., 2025). Program di PERMAI memperluas fokus tersebut dengan memasukkan literasi hukum ke dalam rangkaian pemberdayaan yang juga memuat kecakapan digital dan dukungan psikososial. Berdasarkan dokumentasi kegiatan, capaian yang dapat dinyatakan adalah terselenggaranya edukasi dan tersedianya ruang diskusi; peningkatan kompetensi hukum individual masih perlu diverifikasi melalui pengukuran terstruktur.

Penguatan literasi digital

Sesi literasi digital menekankan pemanfaatan teknologi untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan mendukung kebutuhan sehari-hari secara kritis dan aman. Peserta diperkenalkan pada pentingnya memilah informasi dan memahami bahwa keterampilan mengoperasikan perangkat belum sepenuhnya mencerminkan literasi digital. Penekanan ini sesuai dengan kerangka UNESCO Institute for Statistics (n.d.) yang menghubungkan literasi digital dengan kemampuan mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi.

Fithriyah et al. (2023) melaporkan pelaksanaan pelatihan literasi digital bagi PMI di Malaysia, yang mengindikasikan relevansi intervensi digital untuk kelompok sasaran ini. Program PERMAI mengintegrasikan tema digital dengan literasi hukum dan psikososial, sehingga teknologi dipahami bukan hanya sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai sarana memperoleh informasi dan memperkuat jejaring. Walaupun arah capaian ini sesuai dengan tujuan program, klaim perubahan kemampuan digital peserta memerlukan bukti tambahan seperti demonstrasi tugas, rubrik keterampilan, atau tes berbasis skenario.

Penguatan ketahanan psikososial

Aspek ketahanan psikososial disampaikan melalui penguatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis, membangun relasi sosial positif, berbagi pengalaman, dan mengembangkan dukungan sebaya. Diskusi dan refleksi memberi ruang bagi peserta untuk mengartikulasikan pengalaman serta melihat komunitas sebagai sumber dukungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pembahasan Sari dan Wicaksana (2024) mengenai integrasi kesiapan psikososial dan edukasi hak, serta kajian Ahyar et al. (2025) tentang ketahanan sosial-psikologis PMI di Malaysia.

Dalam artikel pengabdian, dukungan sebaya perlu dipahami sebagai dukungan sosial komunitas dan bukan sebagai pengganti layanan konseling atau kesehatan mental profesional. Karena tidak tersedia pengukuran psikometrik atau tindak lanjut peserta, hasil yang dapat dilaporkan terbatas pada tersedianya edukasi, dialog, dan refleksi yang mendukung kesadaran akan dukungan sosial. Penelitian atau kegiatan lanjutan dapat mengukur persepsi dukungan sosial, strategi koping, dan akses terhadap layanan dengan instrumen yang sesuai serta prosedur etis.



Gambar 1. Dokumentasi bersama tim pelaksana dan peserta kegiatan penguatan literasi di Learning Center PERMAI Pulau Pinang, Malaysia.

Gambar 1 mendokumentasikan kebersamaan tim pelaksana dan peserta setelah rangkaian kegiatan. Dokumentasi ini menjadi bukti visual keterlibatan komunitas dalam program dan menggambarkan kegiatan sebagai ruang interaksi antara perguruan tinggi dan masyarakat sasaran.



Gambar 2. Momen penyerahan IA dan sertifikat dalam rangkaian kegiatan dan penguatan kemitraan UNJ–PERMAI Pulau Pinang.

Gambar 2 memperlihatkan interaksi perwakilan tim dan mitra dalam momen penyerahan Agreement Implementation (IA) dan sertifikat kegiatan. Dalam konteks pemberdayaan, interaksi kelembagaan seperti ini dapat menjadi bagian dari penguatan relasi dan pengakuan atas kolaborasi. Laporan kegiatan juga mencatat adanya penguatan hubungan UNJ–PERMAI dan penandatanganan Agreement Implementation sebagai salah satu aktivitas kemitraan. Keberlanjutan kemitraan perlu diterjemahkan ke dalam rencana tindak lanjut yang operasional, seperti kaderisasi, penyediaan materi edukasi, dan kegiatan pendampingan berkala.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan lebih tepat dibaca sebagai capaian proses dan fondasi outcome awal. Program telah menyediakan edukasi lintas tema, ruang dialog, dokumentasi partisipasi, dan penguatan jejaring kelembagaan. Integrasi tiga literasi menjadi kontribusi implementatif karena isu hak, informasi digital, dan adaptasi psikososial ditempatkan dalam satu rangkaian kegiatan. Pendekatan ini konsisten dengan literatur yang menempatkan perlindungan dan pemberdayaan PMI sebagai agenda yang memerlukan edukasi, advokasi, serta kolaborasi komunitas (Koesrianti et al., 2026; Sari & Wicaksana, 2024; Suhada et al., 2024)

Tabel 1. Keterkaitan permasalahan, intervensi, dan capaian terdokumentasi

Aspek kebutuhan	Bentuk intervensi	Capaian yang dapat dilaporkan
Literasi hukum	Edukasi hak dan kewajiban, perlindungan hukum, sumber informasi dan bantuan	Edukasi dan ruang diskusi hukum terlaksana; perubahan pengetahuan belum diukur.
Literasi digital	Edukasi penggunaan informasi dan teknologi secara kritis, aman, produktif, dan bertanggung jawab	Materi literasi digital disampaikan; keterampilan praktik perlu diuji dengan instrumen.
Ketahanan psikososial	Refleksi, berbagi pengalaman, relasi positif, dan dukungan sebaya	Ruang dialog dan refleksi tersedia; dampak psikososial jangka panjang belum diukur.
Pemberdayaan komunitas	Koordinasi, partisipasi, dokumentasi, dan penguatan kemitraan	Interaksi UNJ–PERMAI dan dasar kolaborasi lanjutan terdokumentasi.

Tabel 1 membedakan aktivitas yang telah dilaksanakan dari perubahan kapasitas yang memerlukan pengukuran. Pembedaan ini penting agar artikel tidak menyamakan terselenggaranya pelatihan dengan bukti efektivitas. Penilaian outcome pada tahap berikutnya dapat mengombinasikan tes pengetahuan, tugas kinerja digital, refleksi terstruktur, dan wawancara tindak lanjut.

KESIMPULAN (*Conclusions*)

Program pengabdian di Learning Center PERMAI Pulau Pinang telah dilaksanakan melalui edukasi, diskusi, refleksi, dan penguatan kemitraan dengan mengintegrasikan literasi hukum, literasi digital, dan ketahanan psikososial. Dokumentasi menunjukkan terselenggaranya ruang pembelajaran dan interaksi antara tim Universitas Negeri Jakarta dengan komunitas PMI. Integrasi ketiga aspek memberikan kerangka praktik yang relevan untuk membahas hak dan perlindungan, penggunaan informasi digital secara kritis dan aman, serta pentingnya dukungan sosial dalam kehidupan perantauan.

Capaian artikel ini dibatasi pada proses dan hasil yang terdokumentasi; efektivitas dalam bentuk peningkatan skor, perubahan perilaku, atau dampak jangka panjang belum dapat dipastikan tanpa data evaluasi lanjutan. Program berikutnya perlu melaksanakan pengukuran sebelum-sesudah, evaluasi keterampilan berbasis tugas, pendampingan kader, pengembangan media edukasi, dan pemantauan keberlanjutan bersama PERMAI. Dengan langkah tersebut, kemitraan dapat bergerak dari kegiatan edukasi sesaat menuju pemberdayaan komunitas yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNJ yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, serta PERMAI Pulau Pinang, Malaysia atas dukungan dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pengabdian kepada Masyarakat. Terima kasih juga disampaikan

kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Masyarakat Indonesia di Pulau Pinang Malaysia yang berpartisipasi dalam kegiatan edukasi, diskusi, refleksi dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA (*References*)

Ahyar, Saleh, M., Yaqinah, S. N., Amrulloh, Z., Hadi, S., Ibrahim, A. Bin, & Mokhtar, W. K. A. B. W. (2025). The Complex Phenomenon of Community Education : The Lives And Socio-Psychological Resilience of Indonesian Migrant Workers In Malaysia. *Tasamuh: Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *23*(1), 85–104. https://doi.org/10.20414/tasamuh.v23i1.12328

Arief, H., Hidayatullah, Munawar, A., Megasari, I. D., & Adriansyah. (2026). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kuala Lumpur: Literasi Kontrak Kerja Digital dan Bukti Digital Dalam Menghadapi Permasalahan Kerja Indonesia. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, *4*(2), 712–732.

Fithriyah, N. N., Diana, N., Mutia, C. I., & Hasan, K. (2023). Digital Literacy Training For Indonesian Migrant Workers (PMI) In Malaysia. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, *1*(02), 169–176.

Habib, Y. A., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2024). Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers In Malaysia From The International Labor Organization (ILO) Perspective. *International Journal of Business, Law, and Education.*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.956

Koesrianti, K., Khan, S. R., & Widiati, E. P. (2026). A humanist approach to migration governance : protecting irregular Indonesian migrant workers in Malaysia. *Cogent Social Sciences*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2652102

Law, N., Woo, D., Torre, J. de la, Wong, G., For, C., & Information Technology in Education (CITE), U. of H. K. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2 (Information Paper No. 51).* UNESCO Institute for Statistics.

Puteri, D. S., Suhadi, & Muhtada, D. (2025). Jurnal Panjar : Pengabdian Bidang Pembelajaran Marriage Agreement Literacy as a Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, *5*(2), 86–93.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.* Republik Indonesia.

Sari, N. K., & Wicaksana, M. F. (2024). Empowering Indonesian Migrant Workers in Malaysia : A Hybrid Psycho- Social Readiness and Rights Protection Program. *Jurnal Inovasi Dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 343–362. https://doi.org/https://doi.org/10.61650/jip-dimas.v2i2.1201

Suhada, Idries, F. A., Nasrulloh, R. S., & Wulandari, N. D. (2024). Memanusiakan Pahlawan Devisa : Pemberdayaan dan Advokasi Komunitas Migran Indonesia di Malaysia Pendahuluan. *Rahmatan Lil 'Alamin: Journal of Community Services*, *4*(1), 39–47. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RLA.Vol4.iss1.art5